

LAPORAN KINERJA

SEMESTER 1 - TA 2023

Balai Besar Penelitian dan Pengembangan
Vektor dan Reservoir Penyakit



+62 298 327096
b2p2vrp.litbang.kemkes.go.id
bbppvrp.litbang@kemkes.go.id
Jl. Hasanudin 123, Salatiga,
Jawa Tengah

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum wr. wb

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya yang tak terhingga. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Muhammad Shallallahu 'Alaihi wa Sallam, sebagai teladan hidup bagi umat manusia.

Dengan penuh kerendahan hati dan kesyukuran, kami ingin menyampaikan laporan kinerja kami pada periode tertentu. Laporan ini disusun sebagai bentuk akuntabilitas dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab yang telah dipercayakan kepada kami.

Laporan kinerja ini mencakup berbagai aktivitas yang dilakukan selama periode tersebut. Kami mengumpulkan data-data penting untuk menganalisis pencapaian tujuan-tujuan strategis yang telah ditetapkan sebelumnya.

Melalui laporan ini, kami berharap dapat memberikan informasi secara transparan tentang progres kerja dan capaian hasil-hasil positif yang telah dicapai. Selain itu juga akan dijabarkan kendala-kendala yang dihadapi serta upaya-upaya perbaikan yang telah dilakukan agar kedepannya dapat lebih efektif lagi dalam melaksanakan tugas-tugas tersebut.

Tentunya laporan ini tidak terlepas dari dukungan dan bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, kami mengucapkan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang telah ikut serta dalam proses pengumpulan data, memberikan masukan, dan memberikan dukungan moral maupun materiil.

Semoga laporan kinerja ini dapat menjadi acuan bagi kita semua untuk melakukan evaluasi diri guna meningkatkan kualitas kerja dan mencapai hasil yang lebih baik lagi di masa mendatang.

Salatiga, Juli 2023

Plt. Kepala Balai Besar Penelitian dan
Pengembangan Vektor dan Reservoir Penyakit



dr. Bagus Febrianto, M.Sc
NIP 1970022320021001

KATA PENGANTAR.....	1
DAFTAR ISI.....	2
BAB I PENDAHULUAN.....	3
A. Analisis Situasi.....	3
B. Isu Strategis Organisasi.....	6
C. Kelembagaan.....	6
D. Sumber Daya Manusia.....	9
E. Sistematika Laporan.....	13
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	14
A. Perencanaan Kinerja	14
B. Perjanjian Kinerja.....	14
C. Pengukuran Kinerja	16
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	17
A. Capaian Kinerja Organisasi.....	17
B. Analisis dan Evaluasi Pencapaian Kinerja	27
C. Realisasi Anggaran	30
D. Analisis Efisiensi Sumber Daya	32
E. Penghargaan dan Inovasi.....	37
BAB IV PENUTUP.....	39
A. Kesimpulan	39
B. Rekomendasi	39
LAMPIRAN.....	40

BAB I PENDAHULUAN

A. Analisis Situasi

Pandemi COVID-19 telah menunjukkan pentingnya layanan laboratorium kesehatan masyarakat yang memenuhi standar dalam upaya promotif dan preventif. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kapasitas dan ketahanan sistem kesehatan. Dalam pencegahan dan pengendalian penyakit, penting untuk mempercepat pemeriksaan sampel laboratorium serta menyediakan informasi hasil dengan akurat guna melacak pola sebarannya.

Dalam hal ini, diperlukan penguatan kapasitas laboratorium kesehatan masyarakat baik dari segi sarana prasarana maupun sumber daya manusia yang memiliki kemampuan manajerial dan operasional yang baik. Transformasi Sistem Ketahanan Kesehatan juga penting dalam menghadapi kejadian luar biasa, wabah penyakit, dan kedaruratan kesehatan masyarakat melalui penguatan surveilans berbasis komunitas dan laboratorium serta sistem penanganan bencana.

Balai Besar Laboratorium Kesehatan Lingkungan memiliki peranan yang sangat penting dalam mendukung ketahanan kesehatan dengan melakukan pemeriksaan diagnostik penyakit dan faktor risiko yang mempengaruhi masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kapasitas laboratorium ini serta kerjasama, koordinasi, dan jaringan antar laboratorium untuk menghasilkan kebijakan yang meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

Dalam transformasi sektor kesehatan yang sedang berlangsung, B2P2VRP, Salatiga akan menjadi Balai Besar Laboratorium Kesehatan Lingkungan sebagai unit pelaksana teknis Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat. Tugasnya melaksanakan pengelolaan laboratorium kesehatan lingkungan. Selain itu sebagai Balai Besar Laboratorium Kesehatan Lingkungan juga mendukung pelaksanaan tugas dari unit organisasi jabatan pimpinan tinggi madya yang berkesesuaian di lingkungan Kementerian Kesehatan setelah mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal.

Sampai saat ini proses transisi masih berlangsung, namun hingga akhir tahun 2023, B2P2VRP tetap menjalankan tugasnya sesuai mandat kinerja dari Badan Kebijakan pembangunan Kesehatan (BKPK) seperti yang tertuang pada Perjanjian Kinerja yang mencakup sasaran, indikator kinerja, dan target dari BKPK dengan prioritas utama tetap diberikan pada kegiatan yang mendukung persiapan implementasi fungsi laboratorium di masa depan.

Berdasarkan mandat yang diberikan oleh BKPK, B2P2VRP melakukan cascading kinerja sebagai berikut :

Gambar 1 Cascading Kinerja B2P2VRP TA 2023



Capaian kinerja B2P2VRP dinyatakan berhasil apabila Indikator Kinerja Kegiatan yang telah ditetapkan beserta targetnya dapat tercapai. Adapun penetapan IKK dan target mengacu pada kriteria SMART yaitu:

1. *Specific*, spesifik artinya target harus disusun dengan jelas, terinci, dapat dibedakan dari yang lain dan tidak berdwimakna;
2. *Measurable*, terukur artinya dapat diukur, dapat diidentifikasi satuan atau parameter keberhasilannya;
3. *Achievable*, dapat dilaksanakan atau dicapai artinya secara empirik dapat dilaksanakan atau dioperasionalkan, relevan dengan tugas dan fungsinya dan dalam kendali;
4. *Relevance*, terkait langsung dengan (mempresentasikan) apa yang diukur;
5. *Timebound*, memperhatikan fungsi waktu artinya pencapaian target memiliki jadwal dan kurun waktu yang jelas.

Berdasarkan kriteria SMART diatas berikut merupakan analisis terhadap indikator kinerja B2P2VRP Salatiga Tahun 2023 "Persentase kebijakan Kesehatan yang disusun berdasarkan rekomendasi kebijakan Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan sebesar 80%" sebagai berikut:

Tabel 1. Tabel Indikator Kinerja Kegiatan dengan Kriteria SMART

Indikator Kinerja	Kriteria SMART				
	<i>Specific</i>	<i>Measurable</i>	<i>Achievable</i>	<i>Relevance</i>	<i>Timebound</i>
Persentase kebijakan Kesehatan yang disusun berdasarkan rekomendasi kebijakan Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan sebesar 50%	Target indikator kinerja telah secara spesifik menyebut Persentase Kesehatan yang disusun berdasarkan rekomendasi kebijakan Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan sejumlah 50%	IKK dan target serta ukuran keberhasilan B2P2VRP dapat diukur atau dapat diidentifikasi parameternya yaitu 50%	Disusun menyesuaikan kondisi sumber daya organisasi dan relevan dengan tugas pokok serta fungsi B2P2VRP serta dapat dikendalikan (<i>controllable</i>) atau dalam monitoring serta evaluasi pimpinan	IKK dan target serta ukuran keberhasilan B2P2VRP bersifat relevan artinya terkait langsung dengan (merepresentasikan) apa yang akan diukur. Jika target tersebut tercapai, tentu akan memiliki dampak pada pencapaian target BKKP. Selain itu kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan kegiatan program Kementerian Kesehatan untuk meningkatkan pembangunan kesehatan masyarakat Indonesia	IKK dan target serta ukuran keberhasilan B2P2VRP ditetapkan dalam kurun waktu 1 tahun (jangka pendek) dan 5 tahun (jangka menengah). Batas waktu ini realistis agar tiap tahapan kegiatan dapat terfokus dan dapat mempersiapkan sumber daya yang diperlukan

B. Isu Strategis Organisasi

Berdasarkan Surat dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/718/M.KT.01/2023 yang membahas tentang Penataan Organisasi Unit Pelaksana Teknis di Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat, B2P2VRP akan mengalami perubahan menjadi Balai Besar Laboratorium Kesehatan Lingkungan dengan skala nasional. Transformasi ini akan membawa sejumlah tantangan untuk B2P2VRP terkait fungsi laboratorium, yang memerlukan kontribusi dari semua pihak untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya. Beberapa isu penting yang perlu diperhatikan oleh B2P2VRP adalah sebagai berikut:

1. Sarana dan Prasarana: Balai Besar Laboratorium Kesehatan Lingkungan diharapkan berfungsi sebagai laboratorium kesehatan level 5 masih memerlukan dukungan anggaran untuk melengkapi peralatan laboratorium yang diperlukan.
2. Peningkatan Kompetensi SDM: Tenaga teknis dalam organisasi perlu meningkatkan kapasitas mereka terkait tugas dan fungsi satuan kerja yang akan datang.
3. Kualitas Layanan Publik: Kualitas pelayanan publik yang diberikan perlu terus ditingkatkan, dan umpan balik dari pengguna layanan sangat berharga dalam upaya ini
4. Sistem Layanan Berbasis Teknologi Informasi: Optimalisasi sistem layanan yang terintegrasi dengan teknologi informasi masih membutuhkan dukungan baik dari segi anggaran maupun sumber daya manusia.

Dalam rangka menghadapi tantangan ini, perlu adanya kolaborasi dan usaha bersama untuk memastikan bahwa transformasi B2P2VRP menjadi Balai Besar Laboratorium Kesehatan Lingkungan berjalan dengan lancar dan efektif.

C. Kelembagaan

1. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan proses transformasi yang tengah berlangsung, B2P2VRP akan berubah menjadi Balai Besar Laboratorium Kesehatan Lingkungan, sebagai bagian dari unit pelaksana teknis di bawah naungan Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat. Meskipun Permenpan RB sudah disahkan pada akhir Juli 2023, namun B2P2VRP masih tetap dibawah naungan BKPK sampai akhir tahun 2023, sehingga dalam laporan masih menggunakan istilah yang lama. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 65 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, B2P2VRP memiliki tanggung jawab utama untuk melaksanakan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang kesehatan. Secara struktural, B2P2VRP berada di bawah kepemimpinan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, dan koordinasi serta administrasinya diawasi oleh Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan. Dari segi fungsional, B2P2VRP mendapat bimbingan dari Pusat Penelitian dan Biomedis serta Pusat Teknologi Dasar Kesehatan.

Adapun tugas B2P2VRP sesuai dengan Permenkes No 51 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan yaitu melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit tular vektor, reservoir, dan zoonosis.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, B2P2VRP menyelenggarakan fungsi:

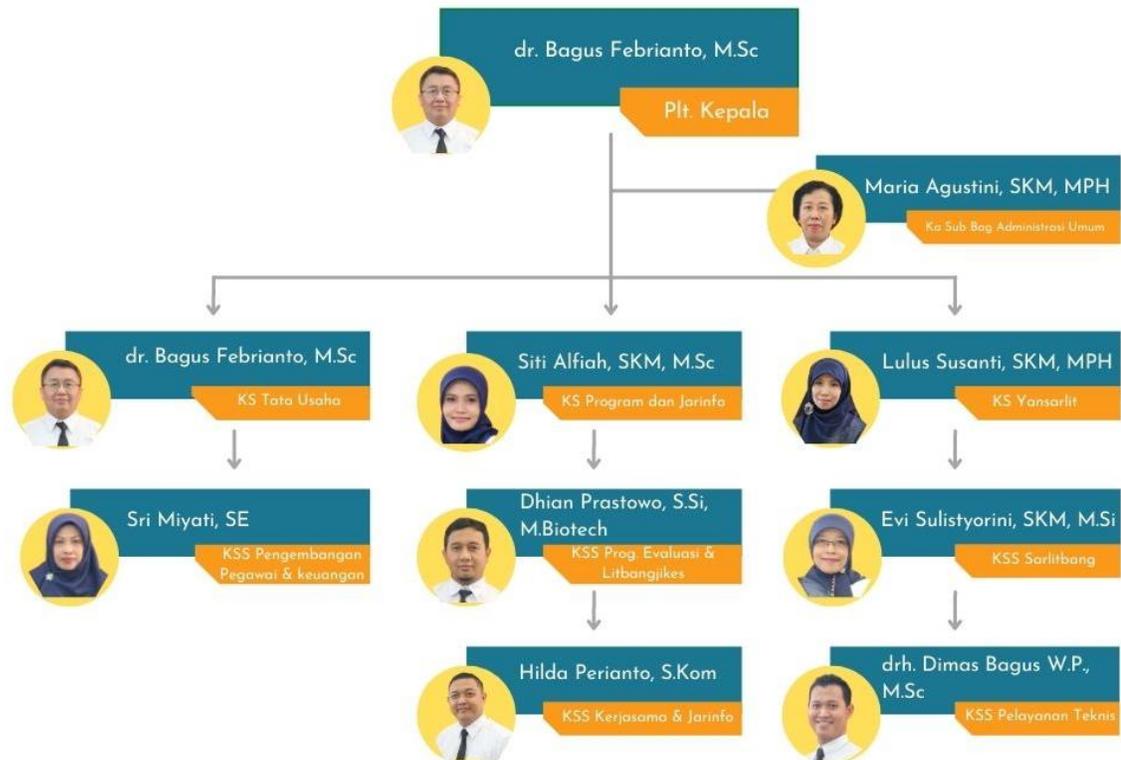
- a. Penyusunan rencana, program, dan anggaran
- b. Pelaksanaan penelitian dan kajian di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit tular vektor, reservoir, dan zoonosis
- c. Pelaksanaan pengembangan metoda, model, dan teknologi di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit tular vektor, reservoir, dan zoonosis
- d. Pelaksanaan pelayanan uji pestisida vektor dan reservoir penyakit
- e. Pengelolaan sarana penelitian dan pengembangan di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit tular vektor, reservoir, dan zoonosis
- f. Pelaksanaan diseminasi, publikasi, dan advokasi hasil penelitian dan pengembangan di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit tular vektor, reservoir, dan zoonosis
- g. Pelaksanaan hubungan masyarakat, kerja sama, dan kemitraan di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit tular vektor, reservoir, dan zoonosis
- h. Pengelolaan jaringan informasi penelitian dan pengembangan dan perpustakaan di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit tular vektor, reservoir, dan zoonosis
- i. Pelaksanaan bimbingan teknis penelitian dan pengembangan di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit tular vektor, reservoir, dan zoonosis
- j. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.
- k. Pelaksanaan urusan administrasi B2P2VRP

2. Struktur Organisasi

Selama dua tahun terakhir, B2P2VRP telah dikepalai oleh seorang Pelaksana Tugas (Plt). Hal ini disebabkan karena belum ditemukannya kepala yang sesuai melalui proses lelang (*bidding*) yang dilakukan. Meskipun telah berupaya mencari sosok yang tepat untuk memimpin lembaga ini, proses seleksi kepemimpinan masih berlangsung, dan Plt terus menjalankan tugasnya untuk memastikan kelancaran operasional dan pengembangan B2P2VRP

B2P2VRP dalam melaksanakan tugas, saat ini dipimpin oleh seorang Plt. Kepala yang didukung oleh Kepala Sub Bagian Administrasi Umum serta dibantu Koordinator Kelompok Substansi Tata Usaha; Koordinator Kelompok Substansi Program, Kerjasama dan Jaringan Informasi; Koordinator Kelompok Substansi Layanan dan Sarana Pengembangan dan Pengkajian.

Gambar 2. Struktur Organisasi Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Vektor dan Reservoir Penyakit Tahun 2023



Kepala Sub Bagian Administrasi Umum bertugas melakukan koordinasi penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan keuangan dan barang milik negara, urusan kepegawaian, organisasi dan tatalaksana, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, kearsipan, persuratan, dan kerumahtanggaan B2P2VRP.

Koordinator Kelompok Substansi Program, Kerjasama dan Jaringan Informasi (PKS dan JI) mempunyai tugas mengkoordinasi penyusunan perencanaan, koordinasi, pelaksanaan dan evaluasi program dan anggaran, kerjasama dan kemitraan penelitian dan pengembangan, pengelolaan jaringan informasi ilmiah dan perpustakaan serta evaluasi dan pelaporan. Dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh 2 orang KSS yaitu :

- a. Sub Koordinator Kelompok Substansi Program dan Evaluasi Litbangjikes dan Subbidang Kerjasama dan Jaringan Informasi. Subbidang Program dan Evaluasi bertugas untuk melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana program dan anggaran, serta evaluasi dan pelaporan

- b. Sub Koordinator Kelompok Substansi Kerjasama dan Jaringan Informasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan kerjasama dan kemitraan penelitian dan pengembangan di bidang pengendalian vektor, reservoir dan zoonosis penyakit serta melakukan penyediaan dan diseminasi informasi hasil penelitian, serta pengelolaan jaringan informasi ilmiah dan perpustakaan.

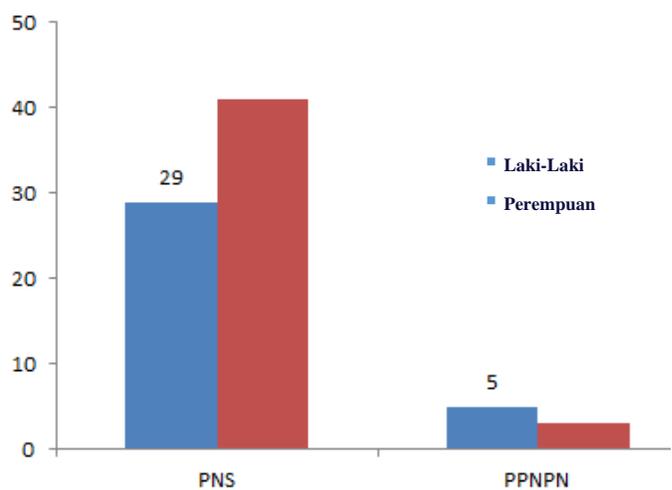
Koordinator Kelompok Substansi Layanan dan Sarana Pengembangan dan Pengkajian bertugas mengkoordinasi penyusunan rencana, pelaksanaan dan evaluasi pelayanan penelitian, konsultasi dan pengujian insektisida, pelatihan tenaga teknis penelitian di bidang pengendalian vektor, reservoir dan zoonosis penyakit. Dalam melaksanakan tugas dibantu oleh 2 KSS yaitu:

- a. Sub Koordinator Kelompok Substansi Pelayanan Teknis yang bertugas mengkoordinasi penyiapan bahan pelaksanaan pelayanan teknis di bidang pengendalian vektor, reservoir dan zoonosis penyakit.
- b. Sub Koordinator Kelompok Substansi Sarana Pengembangan dan Pengkajian yang bertugas mengkoordinasi pengelolaan sarana penelitian dan penyiapan bahan pelaksanaan uji efikasi insektisida rumah tangga dan insektisida digunakan program.

D. Sumber Daya Manusia

Pada tahun 2023, jumlah total pegawai di B2P2VRP mencapai 78 orang. Dari jumlah tersebut, sebanyak 70 orang (89,74%) merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS), sementara 8 orang (10,26%) termasuk dalam kategori Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN). Sedangkan berdasarkan jenis kelamin, pegawai B2P2VRP disajikan pada gambar di samping ini:

Pegawai di B2P2VRP memiliki beragam latar belakang pendidikan, mulai dari tingkat Sekolah Dasar (SD) hingga tingkat S3 (Doktoral). Mayoritas Pegawai Negeri Sipil (PNS) di B2P2VRP memiliki latar belakang pendidikan Strata Sarjana, dengan jumlah sebanyak 30 orang (42,86%). Begitu pula, mayoritas Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) memiliki pendidikan Strata Sarjana, dengan jumlah terbesar sebanyak 4 orang (50%).



Gambar 3 Jumlah Pegawai Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Vektor dan Reservoir Penyakit Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2023

Meskipun demikian, ada juga PNS yang memiliki pendidikan terendah yaitu Sekolah Dasar, dengan jumlah 2 orang (2,8%), dan PPNPN dengan pendidikan terendah yaitu Sekolah Menengah Atas, dengan jumlah 1 orang (3,2%). Adapun jumlah dan persentase pegawai B2P2VRP menurut pendidikan dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2 Jumlah dan Persentase Pegawai B2P2VRP menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2023

Jenjang Pendidikan	PNS		PPNPN	
	Jumlah	Persen	Jumlah	Persen
Strata Doktor	1	1,43	0	0
Strata Magister	14	20,00	0	0
Strata Sarjana	30	42,86	4	50,00
Diploma 3	13	18,57	3	37,50
Diploma 2	0	0	0	0
Diploma 1	1	1,43	0	0
Sekolah Menengah Atas	5	7,14	1	12,50
Sekolah Menengah Pertama	4	5,71	0	0
Sekolah Dasar	2	2,86	0	0
Total	70	100	8	100

Sumber : SIMKA TA 2023

Jumlah dan persentase PNS dan PPNPN B2P2VRP berdasarkan jabatan terlihat dalam tabel di bawah ini. Jumlah terbesar pegawai B2P2VRP tahun 2023 berdasarkan jabatan ada pada kelompok Teknisi Litkayasa Penyelia (JF) sebanyak 7 orang (10,00%). Pegawai PPNPN yang terbesar menduduki jabatan sebagai tenaga pramubhakti sebanyak 8 orang (100%).

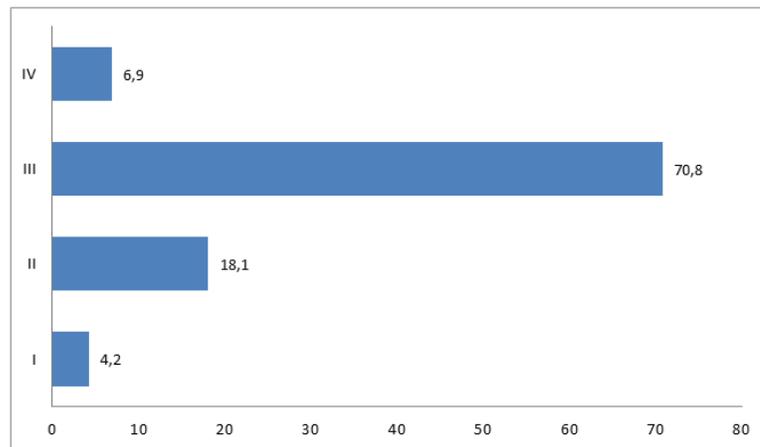
Tabel 3 Jumlah dan Persentase Pegawai B2P2VRP menurut Jabatan Tahun 2023

Jabatan	PNS		PPNPN	
	Jumlah	Persen	Jumlah	Persen
A. Jabatan Struktural				
1. Kepala Subbagian Administrasi Umum	1	1,43	0	0
B. Jabatan Fungsional				
1. Analis Kebijakan Ahli Madya	1	1,43	0	0
2. Epidemiolog Kesehatan Ahli Madya	2	2,86	0	0

Jabatan	PNS		PPNPN	
	Jumlah	Persen	Jumlah	Persen
3. Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku Ahli Madya	1	1,43	0	0
4. Entomolog Kesehatan Ahli Muda	3	4,29		
5. Epidemiolog Kesehatan Ahli Muda	1	1,43	0	0
6. Peneliti Ahli Muda	1	1,43	0	0
7. Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku Ahli Muda	1	1,43	0	0
8. Pranata Komputer Ahli Muda	1	1,43	0	0
9. Dokter Ahli Pertama	1	1,43	0	0
10. Peneliti Ahli Pertama	6	8,57	0	0
11. Perencana Ahli Pertama	1	1,43	0	0
12. Pranata Komputer Ahli Pertama	1	1,43	0	0
13. Pranata Laboratorium Kesehatan Ahli Pertama	2	2,86	0	0
14. Statistisi Ahli Pertama	1	1,43	0	0
15. Analis Kepegawaian Ahli Pertama	1	1,43	0	0
16. Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama	1	1,43	0	0
17. Arsiparis Penyelia	1	1,43	0	0
18. Teknisi Litkayasa Penyelia	7	10,00	0	0
19. Pranata Keuangan APBN Mahir	1	1,43	0	0
20. Teknisi Litkayasa Mahir	6	8,57	0	0
21. Analis Kepegawaian Terampil	1	1,43	0	0
22. Arsiparis Terampil	1	1,43	0	0
23. Pranata Komputer Terampil	1	1,43	0	0
24. Teknisi Litkayasa Terampil	3	4,29	0	0
C. Jabatan Pelaksana				
1. Analis Barang Milik Negara	1	1,43	0	0
2. Analis Keuangan	1	1,43	0	0
3. Pengelola Keuangan	3	4,29	0	0
4. Pengelola Barang Milik Negara	3	4,29	0	0
5. Pranata Laboratorium Perekayasaan	7	10,00	0	0
6. Pengelola Instalasi Air dan Listrik	2	2,86	0	0
7. Petugas Keamanan	1	1,43	0	0
8. Pengemudi	1	1,43	0	0
9. Pramubakti	4	5,71	8	100
Total	70	100	8	100

Sumber : SIMKA TA 2023

Berdasarkan golongan, PNS B2P2VRP terdiri dari golongan IV sebanyak 5 orang (6.9%), golongan III sebanyak 51 orang (70.8%), golongan II sebanyak 13 orang (18.1%) dan golongan I sebanyak 3 orang (4.2%). Gambaran ini dapat dilihat pada grafik di bawah ini.



Gambar 4 Jumlah Pegawai Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Vektor dan Reservoir Penyakit Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2023

Untuk meningkatkan kualitas kompetensi dan profesionalisme pegawai dalam kerangka manajemen sumber daya manusia, pendekatan dilakukan melalui pemberian izin kepada pegawai untuk mengikuti program tugas belajar (tubel) dan izin belajar (ibel), yang dipilih dengan cermat sesuai dengan kebutuhan unit kerja. Total 10 pegawai saat ini sedang menjalani program tugas belajar, dengan rincian 3 di antaranya sedang menjalani izin belajar. Berikut adalah daftar pegawai yang melaksanakan tugas belajar dan izin belajar :

Tabel 4 Daftar Tugas Belajar dan Tugas Belajar Mandiri B2P2VRP Tahun 2023

No	Nama Pegawai	Pendidikan yang dituju (Prodi)	Keterangan
1	Revi Rosavika Kinansi	S2 Epidemiologi UNDIP	Tubel
2	Arief Nugroho	S2 Kesehatan Lingkungan Undip	Tubel
3	Wening Widjajanti	S2 Epidemiologi UNDIP	Tubel
4	Dwi Susilo	S2 Magister Kimia UNDIP	Tubel
5	Arum Triyas Wardani	S2 Magister Kimia Universitas Sebelas Maret	Tubel

No	Nama Pegawai	Pendidikan yang dituju (Prodi)	Keterangan
6	Nuriya Fatchul Janah	DIV Administrasi Pembangunan Negara, STIA LAN Jakarta	Tubel
7	Rima Tunjungsari Dyah Ayuningtyas	S1 Kesehatan Masyarakat, UNDIP	Tubel
8	Siska Indriyani	S1 Kesling, Poltekes Kemenkes Semarang	Tubel
9	Arif Suryo Prasetyo	S1 Kesehatan Masyarakat, UNDIP	Tubel
10	Junarti	S2 Magister Manajemen, Universitas Semarang	Tubel Mandiri
11	Rescy Hutami Putri	S2 Magister Manajemen, UKSW	Tubel Mandiri

Sumber : SIMKA TA 2023

E. Sistematika Laporan

Laporan Kinerja ini disusun mengacu Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja ini disusun dengan sistematika penyajian laporan sebagai berikut:

Bab I – Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum mengenai analisis situasi B2P2VRP saat ini, isu strategis yang dihadapi B2P2VRP, kelembagaan serta sumber manusia yang dimiliki oleh B2P2VRP.

Bab II – Perencanaan Kinerja

Pada bab ini menjelaskan perencanaan dan perjanjian kinerja B2P2VRP tahun 2023 serta pengukuran kinerja B2P2VRP pada tahun 2023.

Bab III – Akuntabilitas Kinerja dan Strategi Pelaksanaan Program/Kegiatan

Pada bab ini menjelaskan mengenai pengukuran capaian kinerja, evaluasi kinerja dan analisis capaian kinerja, analisis faktor yang menghambat pencapaian kinerja, kendala serta tindak lanjut yang dihadapi, analisis atas efisiensi sumber daya, realisasi anggaran, upaya untuk meraih WTP dan RB, penghargaan dan inovasi yang diperoleh serta sumber data untuk menyusun Laporan Kinerja ini.

Bab IV – Penutup

Pada bab ini menjelaskan kesimpulan secara umum serta langkah dimasa mendatang yang akan dilakukan B2P2VRP untuk meningkatkan kinerja.

Lampiran - Lampiran

BAB II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja

A. Perencanaan Kinerja

Perencanaan kinerja memiliki peran sentral dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah karena membantu menetapkan arah program dan kegiatan instansi serta mengelola sumber daya dan tantangan yang dihadapi untuk meningkatkan kinerja organisasi. Kegiatan ini merupakan rincian dari tujuan dan program yang telah diatur dalam rencana strategis yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan.

Proses penyusunan rencana kinerja dilakukan bersamaan dengan penyusunan rencana anggaran. Ini menunjukkan komitmen B2P2VRP untuk mengalokasikan sumber daya, guna mencapai tujuan kegiatan dalam tahun tertentu. Dalam praktiknya, perencanaan kinerja mengacu pada dokumen perencanaan seperti Rencana Aksi 2020-2024 dan Rencana Kerja Tahun 2023.

1. Rencana Aksi Kegiatan (RAK) 2020-2024

Rencana Aksi Kegiatan (RAK) merupakan panduan lima tahunan untuk pelaksanaan tugas pokok dan fungsi B2P2VRP secara terstruktur, terarah, dan terintegrasi. Rencana ini disusun dengan merujuk pada Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Kesehatan RI tahun 2020-2024, Rencana Aksi Program (RAP) eselon I Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan 2022-2024, serta Rencana Aksi Kegiatan eselon II Pusat Kebijakan Sistem Ketahanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan tahun 2022-2024. Rencana lima tahun ini selanjutnya diuraikan dalam rencana kinerja tahunan 2023.

2. Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023

Rencana Kerja atau Renja tahun 2023 adalah dokumen yang berisi kebijakan, program, dan kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan pada tahun 2023. Renja B2P2VRP menjadi satu di dalam Renja Pusat Kebijakan Sistem Ketahanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan sebagai Pusat Pengampu.

B. Perjanjian Kinerja

Sebagai implementasi dari tujuan yang ingin dicapai dalam Rencana Aksi Kegiatan dan Rencana Kerja Tahunan, setiap tahun setiap lembaga membuat komitmen yang tercantum dalam Perjanjian Kinerja. Dokumen Perjanjian Kinerja ini berisi tekad untuk mencapai rencana kinerja tahunan antara pimpinan lembaga pemerintah atau unit kerja yang bertanggung jawab dengan pihak yang memberikan tanggung jawab tersebut. Dokumen ini juga berfungsi untuk mempertanggungjawabkan hasil pencapaian atau kegagalan terhadap target kinerja.

Perjanjian Kinerja memiliki signifikansi yang tinggi bagi B2P2VRP karena mencerminkan tekad dan komitmen untuk mencapai kinerja sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan, dengan mengacu pada tugas, fungsi, wewenang, dan sumber daya yang tersedia. Pada kontrak kinerja tahun 2023, terdapat dua sasaran strategis yang ingin dicapai, dengan tiga indikator kinerja yang akan digunakan untuk mengukur pencapaian sasaran strategis tersebut.

Kebijakan anggaran tahun 2023 merupakan upaya pemerintah untuk menjaga stabilitas ekonomi Indonesia di tengah ketidakpastian global yang masih berlanjut pada tahun berikutnya. APBN dirancang untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional dan reformasi struktural, serta memberikan perlindungan sosial kepada kelompok masyarakat yang rentan. Kebijakan ini difokuskan pada beberapa hal, termasuk peningkatan kualitas SDM, percepatan reformasi sistem perlindungan sosial, pengembangan infrastruktur pendukung transformasi ekonomi, pembangunan infrastruktur di ibu kota baru, revitalisasi industri, dan perbaikan sistem birokrasi serta penyederhanaan regulasi.

Kebijakan ini juga berdampak pada alokasi anggaran B2P2VRP, yang terdampak *Automatic Adjustment* dari awalnya 24.806.297.000 menjadi 24.121.690.000 pada semester pertama. Meskipun demikian, kebijakan *Automatic Adjustment* ini tidak mengurangi komitmen B2P2VRP untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Tabel 5 Perjanjian Kinerja Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Vektor dan Reservoir Penyakit Tahun 2023

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya kebijakan sistem ketahanan kesehatan dan sumber daya kesehatan berbasis bukti	1. Persentase Kebijakan Kesehatan yang disusun berdasarkan rekomendasi kebijakan BKPK	80
2.	Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya	1. Nilai kinerja penganggaran Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan	93
		2. Persentase Realisasi Anggaran Satker	95

Berikut adalah definisi operasional dari indikator kinerja yang disajikan pada tabel di atas:

1. Persentase Kesehatan berdasarkan Rekomendasi Kebijakan BKPK

Ini mengacu pada persentase kebijakan atau peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah di sektor Kesehatan. Kebijakan ini harus disusun berdasarkan rekomendasi hasil evaluasi dari Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK).

2. Nilai Kinerja Anggaran Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan

Ini mencerminkan nilai hasil dari perhitungan kinerja anggaran yang diukur menggunakan metode SMART yang telah diimplementasikan oleh Kementerian Keuangan.

3. Realisasi Anggaran Satuan Kerja (Satker)

Ini mengukur besarnya realisasi anggaran yang telah dicapai oleh setiap Satuan Kerja (Satker). Data ini berasal dari Laporan Keuangan yang telah diaudit oleh Auditor Pemerintah Internal Pusat (APIP).

Semua definisi ini menggambarkan bagaimana pengukuran kinerja dan pencapaian terkait dengan aspek kebijakan, anggaran, dan pelaksanaan di sektor kesehatan dilakukan.

C. Pengukuran Kinerja

Pengukuran Kinerja adalah upaya untuk menilai sejauh mana pencapaian organisasi berhasil atau gagal. Ini melibatkan pendekatan terstruktur dan berkesinambungan untuk mengevaluasi sejauh mana kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana dan kebijakan, dengan tujuan mencapai target yang telah ditetapkan. Proses pengukuran, evaluasi, dan analisis kinerja ini berdasarkan pada penilaian internal (*self assessment*) dengan mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.02/2021 Tahun 2021 mengenai Pengukuran dan Evaluasi Kinerja pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara / Lembaga.

Pendekatan pengukuran kinerja ini melibatkan perbandingan antara hasil yang telah dicapai dengan rencana yang telah ditetapkan untuk setiap indikator, sehingga memberikan gambaran tentang tingkat keberhasilan dalam mencapai masing-masing indikator. Kriteria yang digunakan untuk menilai ini adalah sebagai berikut:

Tabel 6 Kriteria Capaian Penilaian Kinerja

No	Kriteria	Rata-Rata % Capaian
1	Sangat Baik	>90% - 100%
2	Baik	>80% - 90%
3	Cukup	>60% - 80%
4	Kurang	>50% - 60%
5	Sangat Kurang	≤50%

BAB III

Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi

Kinerja B2P2VRP didasarkan pada indikator yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja tahun 2023. Dokumen ini berfungsi sebagai alat ukur untuk menilai sejauh mana pencapaian kinerja telah berhasil atau belum dalam mengukur hasil-hasil yang dicapai. Proses penilaian ini melibatkan perbandingan antara realisasi kinerja yang terjadi dengan target kinerja yang telah ditetapkan.

Untuk memantau dan mengevaluasi indikator kegiatan, proses monitoring dan evaluasi dilakukan secara berkala, yakni setiap bulan, triwulan, dan tahunan. Pemantauan dan evaluasi ini menggunakan berbagai instrumen, diantaranya melalui pengisian e-monev (elektronik monitoring dan evaluasi) dari BAPPENAS (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional), e-monev dari DJA (Direktorat Jenderal Anggaran), serta penyusunan matriks sandingan Renstra-Renja-RKP (Rencana Strategis - Rencana Kerja - Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga) dan RKAKL (Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga).

Analisis terhadap capaian kinerja dimulai dengan memetakan jumlah rekomendasi kebijakan yang telah dilakukan hingga tahun 2023. Hal ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai sejauh mana implementasi rekomendasi kebijakan telah berjalan, dengan rincian yang terperinci.

Upaya untuk mengukur dan menganalisis capaian kinerja B2P2VRP ini memerlukan pendekatan yang sistematis dan berkala, serta melibatkan berbagai instrumen dan lembaga terkait untuk memastikan bahwa tujuan dan target yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan optimal. Adapun capaian kinerja B2P2VRP tahun 2023 disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 7 Capaian Indikator Kinerja B2P2VRP Semester 1 Tahun 2023

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya kebijakan sistem ketahanan kesehatan dan sumber daya kesehatan berbasis bukti	1. Persentase Kebijakan Kesehatan yang disusun berdasarkan rekomendasi kebijakan BKPK	75
2.	Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya	1. Nilai kinerja penganggaran Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan	37,94
		2. Persentase Realisasi Anggaran Satker	35,77

1. Sasaran program/kegiatan: Meningkatnya kebijakan sistem ketahanan kesehatan dan sumber daya kesehatan berbasis bukti.

Indikator kinerja:

Persentase kebijakan kesehatan yang disusun berdasarkan rekomendasi kebijakan BKPK.

- a. Definisi operasional, cara perhitungan, dan capaian

Persentase kebijakan atau regulasi yang dikeluarkan oleh daerah di bidang kesehatan yang dirumuskan dari rekomendasi hasil kajian yang dihasilkan Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan di tahun-tahun sebelumnya.

Kebijakan atau regulasi yang dimaksud adalah peraturan di bidang kesehatan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota) satu tahun sebelum tahun perhitungan kinerja (T-1). Sedangkan rekomendasi hasil kajian adalah hasil kajian BKPK terhadap isu-sisu strategis kesehatan.

Jumlah kebijakan atau regulasi yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan pada tahun sebelumnya (T-1) yang dirumuskan dari rekomendasi hasil kajian yang dihasilkan BKPK dibagi dengan total jumlah kebijakan atau regulasi yang dikeluarkan Kementerian Kesehatan pada tahun sebelumnya (T-1) dikali 100.

Adapun tahapan pencapaian indikator kinerja dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Identifikasi kebijakan/regulasi kesehatan (T-1)

Tabel 8 Daftar Identifikasi Kebijakan/Regulasi Kesehatan yang Dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Tahun 2022

No	Kebijakan/Regulasi	Pemerintah Daerah
1	Peraturan Daerah Kab. Magelang No 9 Tahun 2022 tentang Penanggulangan Penyakit Menular	Kab. Magelang
2	Peraturan Wali Kota Nomor 57 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 11 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Penyakit	Kota Pekalongan
3	Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2022 Perubahan atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 68 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penularan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kabupaten Kebumen	Kab. Kebumen

2) Identifikasi rekomendasi kebijakan

Berikut ini adalah hasil identifikasi rekomendasi kebijakan/hasil kajian penelitian yang dilakukan oleh B2P2VRP, selama kurun waktu tahun 2016 – 2022 :

- a) Tahun 2016
 - (1) Kajian Ovitrap sebagai Alternatif Pengendalian Vektor DBD
 - (2) Pola Intervensi Vektor Malaria di Kabupaten Kulonprogo, Magelang, Purworejo dan Pati
- b) Tahun 2017
 - (1) Pengendalian Vektor Filariasis Limpatik Menunjang Eliminasi di Jawa Tengah
 - (2) Kajian Eliminasi Malaria di Wilayah Riset Khusus Vektor dan Reservoir Penyakit (Vektora) Tahun 2015
- c) Tahun 2018
 - (1) Giatkan Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) Melalui Pendekatan Keluarga
 - (2) Percepatan Eliminasi Malaria di Beberapa Daerah “Endemis Rendah” di Indonesia
 - (3) Gigitan Kelelawar Berisiko Menularkan Rabies
 - (4) Molekuler Xenomonitoring sebagai Alat Surveilans Limfatik Filariasis
 - (5) Pendekatan One Health dan Jejaring Laboratorium dalam Penanggulangan Leptospirosis
 - (6) Kewaspadaan terhadap Infeksi Hantavirus di Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung
 - (7) Japanese Encephalitis sebagai Ancaman Tular Vektor Masa Depan
 - (8) Cegah Leptospirosis dan Malaria di Wilayah Bencana Sulawesi Tengah
- d) Tahun 2019
 - (1) Pengembangan Prediktor Berbasis Vektor dan Virus dalam Penentuan Risiko Penularan Demam Dengue/Demam Berdarah Dengue di Indonesia
 - (2) Penguatan Surveilans Vektor dalam Peningkatan Mutu ABJ untuk Mengendalikan DBD di DKI Jakarta
 - (3) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di Sekolah sebagai Upaya Pengendalian Demam Berdarah Dengue (DBD) di Provinsi DKI Jakarta
 - (4) Pengendalian Leptospirosis Berbasis Data di Provinsi DKI Jakarta
 - (5) Opsi Kebijakan Strategi untuk Pengendalian Pes dengan Surveilans Silvatik Daerah Enzootik Pes di Indonesia.
- e) Tahun 2020

Menerapkan Sistem Surveilans Leptospirosis di tingkat Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) pada masa pandemi COVID-19 (Hasil Penelitian Tahun 2018 – 2019).

f) Tahun 2021

- (1) Pemilihan Test Cepat (RDT) yang Tepat untuk Diagnosa Leptospirosis di Indonesia
- (2) Surveilans Terintegrasi untuk Meningkatkan Efektifitas Penemuan Kasus sebagai Dasar Perencanaan dan Pengendalian *Japanese encephalitis* di Indonesia
- (3) Perilaku masyarakat dalam Penggunaan Kelambu Berinsektisida di Kabupaten Jayapura
- (4) Pendekatan Kebijakan “*One Health*” untuk Pencegahan dan Pengendalian Coronavirus yang Disebabkan oleh Kelelawar di Indonesia
- (5) Strategi POPM (Pemberian Obat Pencegahan Massal) Filariasis di Kota Pekalongan
- (6) Partisipasi Lintas Sektor dalam Pengendalian Leptospirosis di Kabupaten Kebumen
- (7) Implementasi Metode Participatory Learning and Action (PLA) dalam Intensifikasi Gerakan Satu Rumah Satu Jumantik

g) Tahun 2022

- (1) Pentingnya Surveilans dalam Pemeliharaan Eliminasi Malaria di Kabupaten Wonogiri.
- (2) Pendekatan Kebijakan “*One Health*” untuk Pencegahan dan Pengendalian Virus corona yang disebabkan oleh Kelelawar di Indonesia
- (3) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di Sekolah sebagai Upaya Pengendalian Demam Berdarah *Dengue* (DBD) di Provinsi DKI Jakarta

3) Reviu Analisis Kebijakan/Regulasi yang dirumuskan dari rekomendasi hasil kajian

Mengacu pada Renstra Kementerian Kesehatan 2020-2024 salah satu Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Pusat Kebijakan Sistem Ketahanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan yaitu Persentase kebijakan Kesehatan yang disusun berdasarkan rekomendasi kebijakan BKPK dengan target 80%

Berdasarkan evaluasi yang telah dilakukan terhadap rekomendasi hasil penelitian yang dilakukan oleh B2P2VRP, ditemukan 3 kebijakan/regulasi dalam bidang kesehatan yang dihasilkan dari rekomendasi kebijakan B2P2VRP. Informasi lebih rinci dapat disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 9 Analisis Regulasi yang Dirumuskan/Terkait dengan Rekomendasi Kebijakan Hasil Kajian B2P2VRP Salatiga

No	Kebijakan/Regulasi	Judul Rekomendasi	Hasil Analisis
1	Peraturan Daerah Kab. Magelang No 9 Tahun 2022 tentang Penanggulangan Penyakit Menular	Percepatan Eliminasi Malaria di Beberapa Daerah “Endemis Rendah” di Indonesia	
		Pola Intervensi Vektor Malaria di Kabupaten Kulonprogo, Magelang, Purworejo dan Pati	
2	Peraturan Wali Kota Nomor 57 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 11 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Penyakit	Strategi POPM (Pemberian Obat Pencegahan Massal) Filariasis di Kota Pekalongan	
3	Peraturan bupati no 19 tahun 2022 Perubahan atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 68 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penularan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kabupaten Kebumen	Menunggu Bu Lulus	
4	Surat Kepala Dinas Kesehatan Kab. Wonogiri No. 443.31/27 tanggal 5 Januari 2023	Pentingnya Surveilans dalam Pemeliharaan Eliminasi Malaria di Kabupaten Wonogiri	

Berdasarkan analisis tersebut, terdapat 3 dari 4 kebijakan atau regulasi di bidang kesehatan yang keluar pada tahun 2022 di beberapa daerah yang mempunyai kaitan dengan rekomendasi hasil kajian/penelitian yang dihasilkan oleh B2P2VRP. Dengan demikian capaian output IKK B2P2VRP berdasarkan Perjanjian Kinerja pada semester 1 adalah sebagai berikut:

Capaian IKK =

$$\frac{\sum \text{kebijakan atau regulasi yang dirumuskan dari rekomendasi hasil kajian/penelitian}}{\sum \text{kebijakan atau regulasi bidang kesehatan}} \times 100\%$$

$$= \frac{3}{4} \times 100\%$$

$$= 75\%$$

Capaian ini belum memenuhi target indikator kinerja kegiatan B2P2VRP yaitu Persentase Kebijakan Kesehatan yang disusun berdasarkan rekomendasi kebijakan BKPK dengan capaian 75% dari target 80%.

b. Kendala yang dihadapi

Anggaran rekomendasi kebijakan tidak dapat digunakan oleh B2P2VRP dikarenakan untuk pemenuhan blokir *automatic adjustment*.

c. Analisis keberhasilan

Kerjasama yang berlanjutan antara B2P2VRP dengan beberapa pemerintah daerah memudahkan B2P2VRP mendapatkan data-data terkait vektor, reservoir dan zoonosis untuk dianalisis, meskipun tidak memiliki anggaran untuk kegiatan tersebut.

2. Sasaran kinerja: Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya

a. Indikator kinerja: Nilai kinerja penganggaran Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan

1) Definisi operasional, cara perhitungan dan capaian

Definisi operasional "Nilai Kinerja Penganggaran Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan" adalah Besarnya nilai kinerja penganggaran yang diperoleh melalui perhitungan kinerja menggunakan aplikasi SMART Kementerian Keuangan yang diformulasikan dari :

- (a) Aspek Implementasi yang memperhitungkan realisasi anggaran, konsistensi antara RPD dan RPK, efisiensi dan capaian keluaran yang ditargetkan di dalam RKA-K/L secara tahunan.

- (b) Aspek Manfaat yang memperhitungkan pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan (IKK), Indikator Sasaran Program/Indikator Kinerja Program (IKP) dan Indikator Sasaran Strategis (ISS) yang ditarget di dalam RENJA K/L dan RENSTRA K/L secara tahunan.
- (c) Aspek konteks yang memperhitungkan relevansi, kejelasan, keterukuran informasi kinerja dengan dinamika masalah yang coba dipecahkan melalui intervensi program.

Cara perhitungan: Nilai agregat dari nilai aspek implementasi (terdiri nilai realisasi, konsistensi, efisiensi, pencapaian keluaran dan kesesuaian RPK- RPD), aspek manfaat dan aspek konteks menggunakan aplikasi SMART Kementerian Keuangan. Adapun tahapan pencapaian indikator kinerja, dilakukan melalui :

- (a) Penginputan data kinerja melalui aplikasi SAKTI

Penginputan capaian output dilakukan melalui Modul Komitmen SAKTI yang meliputi 4 (empat) komponen data utama yang bersifat wajib (mandatory), yaitu:

- (1) Realisasi Volume Rincian Output (RVRO)
- (2) Progress Capaian Rincian Output (PCRO)
- (3) Keterangan
- (4) Referensi untuk data dengan gap anomali

- (b) Pertemuan monitoring dan evaluasi triwulanan

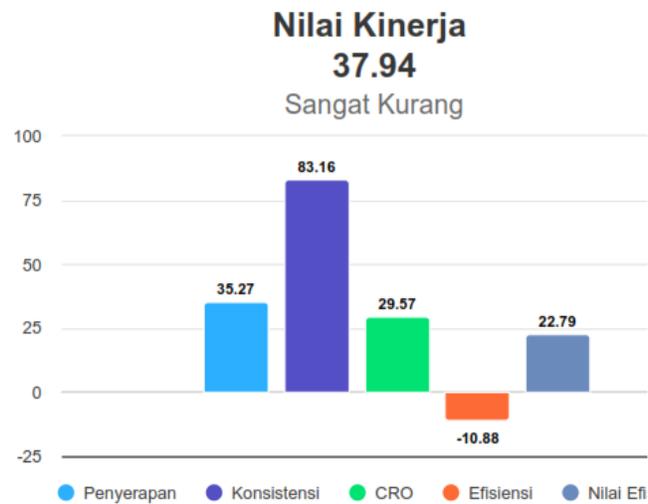
Setiap tiga bulan dilaksanakan pertemuan secara berkala baik internal B2P2VRP dengan bidang bagian maupun berjenjang antara satuan kerja (satker) dan BKPK untuk menyelaraskan data mengenai pencapaian anggaran, kinerja, dan perkembangan pelaksanaan kegiatan pada tahun yang sedang berlangsung.

Berdasarkan perhitungan kinerja menggunakan aplikasi SMART Kementerian Keuangan, capaian B2P2VRP Salatiga sampai akhir semester I mencapai 37,94. Meskipun demikian, capaian ini masih dalam tahap peningkatan dan diharapkan akan terus meningkat hingga akhir tahun anggaran untuk mencapai target yang ditetapkan.

Hasil Nilai Kinerja Anggaran B2P2VRP Tahun 2023 diperoleh dari nilai penyerapan anggaran, nilai konsistensi penyerapan anggaran terhadap RPD, nilai Capaian Rincian Output (CRO), dan nilai efisiensi yang ditampilkan pada aplikasi SMART DJA yang diperoleh dari hasil pengukuran aspek implementasi yang terdiri dari variabel:

- (a) Penyerapan anggaran sebesar 35.27 persen.
- (b) Konsistensi atas RPD sebesar 83.16 persen
- (c) Capaian Rincian Output sebesar 29.57 persen
- (d) Nilai Efisiensi sebesar 22.79 persen

Gambar 5 Dashboard Smart DJA Semester I TA 2023



Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.02/2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran dapat disimpulkan bahwa nilai kinerja anggaran B2P2VRP tahun 2023 termasuk kategori sangat kurang.

2) Kendala dan Tindak Lanjut

Kendala di semester I masih rendahnya konsistensi RPD terhadap penyerapan, dan kurangnya monitoring dalam penginputan di aplikasi SAKTI. Tindak lanjut yang dilakukan melakukan percepatan kegiatan, berkoordinasi dengan operator SAKTI dalam melakukan penginputan.

b. Indikator kinerja: Persentase Realisasi Anggaran BKPK

1) Definisi operasional

Persentase realisasi anggaran untuk pelaksanaan kegiatan B2P2VRP Salatiga.

2) Cara perhitungan

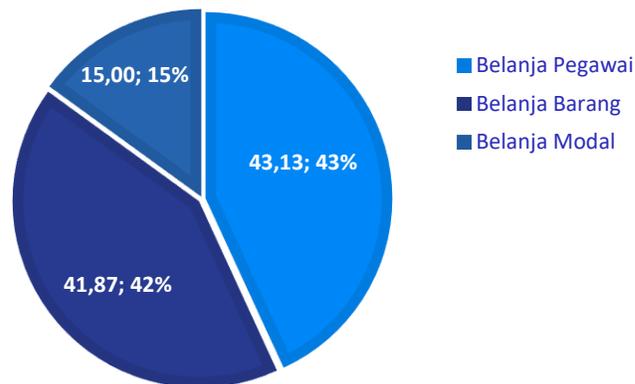
Jumlah total realisasi anggaran B2P2VRP 2023 pada tahun berjalan dibagi dengan total alokasi anggaran (pagu akhir apabila terdapat revisi) pada tahun tersebut.

Anggaran B2P2VRP bersumber dari DIPA dengan No. SP DIPA-024.11.2.520607/2023 dimana pagu awal alokasi anggaran tahun 2023 adalah sebesar Rp 24.806.297.000,-. Sepanjang semester 1, B2P2VRP melaksanakan beberapa kali revisi diantaranya kebijakan revisi *automatic adjustment* dan revisi penambahan pagu untuk *Project Penanggulangan Dengue dengan Metode Wolbachia* dimana berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan, nomor : HK.01.07/MENKES.1341/2022, tanggal 10 Agustus 2022 tugas ini merupakan penunjukan langsung dari Menteri Kesehatan.

Proses revisi anggaran dilaksanakan sesuai dengan kewenangan mulai dari revisi KPA, Kanwil DJPb hingga revisi kewenangan DJA. Total pagu anggaran pada akhir semester 1 menjadi Rp. 24.121.690.000,- dengan realisasi anggaran Rp 8.163.190.444,- atau 35.77%.

Komposisi alokasi anggaran B2P2VRP pada akhir semester I berdasarkan akun terbagi menjadi tiga yaitu belanja Pegawai sebesar Rp 10.404.825.000,- atau sebesar 43,13%, Belanja Barang sebesar Rp 10.099.149.000,- atau sebesar 41,87% dan belanja modal sebesar Rp 3.617.716.000,- atau sebesar 15%.

Gambar 6 Persentase Komposisi Anggaran B2P2VRP Semester I TA 2023



3) Faktor penghambat pencapaian target

- (a) Adanya kebijakan self-blocking anggaran terkait automatic adjustment, yang menyebabkan beberapa kegiatan harus menyesuaikan rencana pelaksanaannya.
- (b) Masih berlangsungnya proses transisi organisasi yang belum selesai telah menyebabkan beberapa kegiatan terkait dengan nomenklatur satker masih tertunda menunggu penyelesaian nomenklatur satker yang definitif
- (c) Kegiatan optimalisasi PNBPN belum bisa direalisasikan karena target penerimaan PNBPN pada semester I belum tercapai.

- 4) Permasalahan/kendala yang dihadapi dan alternatif solusi yang telah dilakukan
- Mengadaptasi Rencana Pelaksanaan Kegiatan dan Rencana Penarikan Dana (RPK/RPD) untuk beberapa kegiatan
 - Melakukan revisi anggaran untuk mengakomodasi kegiatan yang belum mendapatkan alokasi anggaran
 - Mengoptimalkan penerimaan PNBK pada semester II

Berikut disajikan sandingan antara alokasi anggaran awal, revisi anggaran, dan pencapaian anggaran B2P2VRP Salatiga yang telah terealisasi pada tahun 2023, berdasarkan rincian hasil yang dihasilkan (RO):

Tabel 10 Pagu dan Realisasi Anggaran B2P2VRP per Klasifikasi Rincian Output (KRO) dan Rincian Output (RO) Berdasarkan Pagu Akhir Semester I TA 2023

Kode	Program/Kegiatan/KRO/RO	Pagu Awal	Pagu Revisi	Realisasi	Keterangan
024.11.DS	Program Kebijakan Pembangunan Kesehatan	5.001.184.000	6.043.725.000	1.053.550.190	
6834	Perumusan Kebijakan Sistem Ketahanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan	5.001.184.000	6.043.725.000	1.053.550.190	
6834.BDD	Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	5.001.184.000	6.043.725.000	1.053.550.190	
6834.BDD.001	Rekomendasi Kebijakan Penyakit Berbasis Vektor dan Zoonosis di Indonesia (UPT)	75.000.000	24.856.000	0	AA
6834.BDD.014	Integrasi dan Sinergi dalam rangka pencapaian pembangunan kesehatan	174.265.000	99.697.000	0	AA
6834.BDD.015	Akreditasi Laboratorium	285.669.000	154.955.000	23.222.289	AA
6834.BDD.016	Pengadaan Reagen	500.000.000	500.000.000	164.631.981	
6834.BDD.017	Pengadaan Peralatan Laboratorium	2.000.000.000	1.788.901.000	329.980.000	AA
6834.BDD.018	Penguatan Koloni Insektarium	55.600.000	25.000.000	2.600.000	
6834.BDD.020	Pembangunan gedung Laboratorium	1.650.316.000	1.650.316.000	199.497.120	
6834.BDD.021	Surveilans Kesehatan Masyarakat (UPT)	260.334.000	1.800.000.000	333.618.800	Penambahan Alokasi Wolbachia

Kode	Program/Kegiatan/KRO/RO	Pagu Awal	Pagu Revisi	Realisasi	Keterangan
024.11.WA	Program Dukungan Manajemen	19.805.113.000	6.043.725.000	1.053.550.190	
6797	Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan	19.805.113.000	6.043.725.000	1.053.550.190	
6797.CAN	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	383.161.000	94.217.000	60.737.000	
6797.CAN.951	Sarana Teknologi Informasi dan Komunikasi	383.161.000	94.217.000	60.737.000	
6797.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	18.549.180.000	17.425.712.000	6.874.709.001	
6797.EBA.956	Layanan BMN	37.284.000	12.460.000	3.360.000	
6797.EBA.958	Layanan Hubungan Masyarakat	246.220.000	136.088.000	12.838.500	
6797.EBA.962	Layanan Umum	49.712.000	61.200.000	53.468.549	
6797.EBA.963	Layanan Data dan Informasi	56.440.000	56.440.000	10.650.000	
6797.EBA.994	Layanan Perkantoran	18.159.524.000	17.159.524.000	6.794.391.952	
6797.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	78.804.000			
6797.EBB.951	Layanan Sarana Internal	78.804.000			AA
6797.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal	259.878.000	157.616.000	32.456.464	
6797.EBC.954	Layanan Manajemen SDM	259.878.000	157.616.000	32.456.464	
6797.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	534.090.000	400.420.000	141.737.789	
6797.EBD.952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	199.106.000	156.172.000	35.294.225	
6797.EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	52.212.000	32.396.000	26.996.464	
6797.EBD.955	Layanan Manajemen Keuangan	227.060.000	180.996.000	68.797.000	
6797.EBD.961	Layanan Reformasi Kinerja	24.856.000	32.396.000	0	AA
6797.EBD.974	Layanan Penyelenggaraan Kearsipan	30.856.000	180.996.000	10.650.100	

B. Analisis dan Evaluasi Pencapaian Kinerja

Kinerja B2P2VRP dievaluasi dengan merujuk pada indikator yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja (PK). Penilaian kinerja B2P2VRP Salatiga mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Menteri PAN dan RB No. 53 Tahun 2014 tentang Panduan Teknis untuk Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, serta Prosedur Pengulasan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Proses evaluasi ini dilakukan dengan membandingkan hasil yang telah dicapai dalam pelaksanaan tugas dengan target yang telah ditetapkan untuk setiap indikator kinerja.

1. Sandingan target dan realisasi kinerja tahun 2023

Tabel 11. Sandingan Target dan Realisasi Kinerja B2P2VRP Salatiga Semester 1 Tahun Anggaran 2023

Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Capaian	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Meningkatnya kebijakan sistem ketahanan kesehatan dan sumber daya kesehatan berbasis bukti	1. Persentase Kebijakan Kesehatan yang disusun berdasarkan rekomendasi kebijakan BKPK	80%	75	93,75%
Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya	1. Nilai kinerja penganggaran Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan	95	37,94	39,94%
	2. Persentase Realisasi Anggaran Satker	98	35,77	36,50%

Dalam tabel tersebut, disimpulkan bahwa pencapaian indikator kinerja B2P2VRP pada semester 1 untuk sasaran program “Meningkatnya kebijakan sistem ketahanan kesehatan dan sumber daya kesehatan berbasis bukti” sudah melampaui 50% dari target dan hampir mendekati target yang telah ditetapkan. Sedangkan pada sasaran program “Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya” masih jauh dibawah target yang telah ditetapkan.

2. Sandingan Capaian Kinerja Semester 1 TA 2023 dengan Capaian Kinerja Tahun 2022

Tabel 12. Sandingan Capaian Kinerja B2P2VRP Salatiga Semester 1 TA 2023 dengan Capaian Kinerja Tahun 2022

Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	2022			2023		
		T	C	%	T	C	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Meningkatnya kebijakan sistem ketahanan kesehatan dan sumber daya kesehatan berbasis bukti	1. Persentase Kebijakan Kesehatan yang disusun berdasarkan rekomendasi kebijakan BKPK	50%	50	100%	80%	75	93,75%

Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	2022			2023		
		T	C	%	T	C	%
Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya	1. Nilai kinerja penganggaran Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan	95	37,94	39,94%	95	37,94	39,94%
	2. Persentase Realisasi Anggaran Satker	98	35,77	36,50%	98	35,77	36,50%

3. Sandingan Realisasi Kinerja Semester I Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah Renja KL dan RAK 2020-2024

Pencapaian pada Semester I tahun 2023 memiliki dampak positif terhadap pencapaian target kinerja di masa yang akan datang. Perbandingan antara kinerja yang telah tercapai pada tahun 2023 dengan target jangka menengah yang telah ditetapkan oleh B2P2VRP Salatiga, sebagaimana yang diuraikan dalam Renja KL dan Rencana Aksi Kegiatan 2020-2024, dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 13 Sandingan Realisasi Kinerja B2P2VRP Salatiga Semester I Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah (RAK 2020-2024)

Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	2020			2021			2022			2023			2024
		T	C	%	T	C	%	T	C	%	T	C	%	T
Meningkatnya kebijakan sistem ketahanan kesehatan dan sumber daya kesehatan berbasis bukti	1. Persentase Kebijakan Kesehatan yang disusun berdasarkan rekomendasi kebijakan BKPK							50%	50	100%	80%	75	93,75%	100
Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya	1. Nilai kinerja penganggaran Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan										95	37,94	39,94%	95
	2. Persentase Realisasi Anggaran Satker										98	35,77	36,50%	98

4. Perbandingan Realisasi Kinerja Semester I Tahun 2023 dengan Satuan Kerja Lain yang Setara

Tabel 14 Sandingan Capaian Kinerja B2P2VRP Salatiga dengan B2P2TOOT Tawangmangu pada Semester 1 TA 2023

Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	B2P2VRP			B2P2TOOT		
		T	C	%	T	C	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Meningkatnya kebijakan sistem ketahanan kesehatan dan sumber daya kesehatan berbasis bukti	1. Persentase Kebijakan Kesehatan yang disusun berdasarkan rekomendasi kebijakan BKPK	80%	75	93,75%	80%	0	0%
Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya	1. Nilai kinerja penganggaran Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan	95	37,94	39,94%	95	86,65	91,21%
	2. Persentase Realisasi Anggaran Satker	98	35,77	36,50%	98	95,52	97,47%
Pagu Anggaran		24.121.690.000			26.219.755.000		
Realisasi		8.163.190.444			22.939.726.673		

C. Realisasi Anggaran

Anggaran B2P2VRP bersumber dari APBN dengan DIPA No. SP DIPA-024.11.2.520607/2023 terdiri dari rupiah murni (RM) dan pendapatan negara bukan pajak (PNBP) dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 15. Sumber Dana B2P2VRP Salatiga pada Semester 1 TA 2023

No	Sumber Dana	Alokasi
1	Rupiah Murni	Rp 23.983.126.000
2	PNBP	Rp 138.564.000
Jumlah		Rp 24.121.690.000

Total pagu anggaran B2P2VRP pada semester 1 TA 2023 sebesar Rp 22.820.048.000,- dengan realisasi anggaran Rp 8.163.190.444,- atau 35,77%. Berikut realisasi penyerapan anggaran berdasarkan Rincian Output (RO) pada semester I tersaji dalam tabel dibawah ini:

Tabel 16 Realisasi Target dan Anggaran B2P2VRP berdasarkan Rincian Output (RO) pada Semester I Tahun 2023

Kode	Program/Kegiatan/ KRO/RO	Volume		Anggaran		Keterangan
		Target	Realisasi	Pagu Revisi	Realisasi	
024.11.DS	Program Kebijakan Pembangunan Kesehatan			6.043.725.000	1.053.550.190	
6834	Perumusan Kebijakan Sistem Ketahanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan			6.043.725.000	1.053.550.190	
6834.BDD	Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	9	3,22	6.043.725.000	1.053.550.190	
6834.BDD.001	Rekomendasi Kebijakan Penyakit Berbasis Vektor dan Zoonosis di Indonesia (UPT)	1	0	24.856.000	0	AA
6834.BDD.014	Integrasi dan Sinergi dalam rangka pencapaian pembangunan kesehatan	1	0	99.697.000	0	AA
6834.BDD.015	Akreditasi Laboratorium	1	0,53	154.955.000	23.222.289	AA
6834.BDD.016	Pengadaan Reagen	1	0,90	500.000.000	164.631.981	
6834.BDD.017	Pengadaan Peralatan Laboratorium	1	0,56	1.788.901.000	329.980.000	AA
6834.BDD.018	Penguatan Koloni Insektarium	1	0,20	25.000.000	2.600.000	
6834.BDD.020	Pembangunan gedung Laboratorium	1	0,46	1.650.316.000	199.497.120	
6834.BDD.021	Surveilans Kesehatan Masyarakat (UPT)	2	0,57	1.800.000.000	333.618.800	Penambahan Alokasi Wolbachia
024.11.WA	Program Dukungan Manajemen			6.043.725.000	1.053.550.190	
6797	Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan			6.043.725.000	1.053.550.190	
6797.CAN	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	3	2,95	94.217.000	60.737.000	
6797.CAN.951	Sarana Teknologi Informasi dan Komunikasi	3	2,95	94.217.000	60.737.000	

Kode	Program/Kegiatan/ KRO/RO	Volume		Anggaran		Keterangan
		Target	Realisasi	Pagu Revisi	Realisasi	
6797.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	5	2,41	17.425.712.000	6.874.709.001	
6797.EBA.956	Layanan BMN	1	0,6	12.460.000	3.360.000	
6797.EBA.958	Layanan Hubungan Masyarakat	1	0,30	136.088.000	12.838.500	
6797.EBA.962	Layanan Umum	1	0,77	61.200.000	53.468.549	
6797.EBA.963	Layanan Data dan Informasi	1	0	56.440.000	10.650.000	
6797.EBA.994	Layanan Perkantoran	1	0,74	17.159.524.000	6.794.391.952	
6797.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal			157.616.000	32.456.464	
6797.EBC.954	Layanan Manajemen SDM	70	37	157.616.000	32.456.464	
6797.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal			400.420.000	141.737.789	
6797.EBD.952	Layanan Perencanaan dan Panganggaran	1	0,6	156.172.000	35.294.225	
6797.EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	1	0,7	32.396.000	26.996.464	
6797.EBD.955	Layanan Manajemen Keuangan	1	0,94	180.996.000	68.797.000	
6797.EBD.961	Layanan Reformasi Kinerja	1	0	32.396.000	0	AA
6797.EBD.974	Layanan Penyelenggaraan Kearsipan	1	0,6	180.996.000	10.650.100	

D. Analisis Efisiensi Sumber Daya

Sumber daya memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga kelancaran pelaksanaan program dan mencapai target yang telah ditetapkan. Selain itu, B2P2VRP secara teratur melakukan pemantauan dan evaluasi secara terus-menerus, termasuk yang dilakukan setiap bulan (pemantauan DJA dan Bappenas), setiap tiga bulan (pertemuan triwulan internal B2P2VRP dan pertemuan dengan satuan kerja di Badan Litbangkes), dan setiap semester (Evaluasi SKP). Tujuannya adalah agar semua kegiatan dapat berjalan dengan efektif dan efisien.

1. Sumber Daya Anggaran

a. Efisiensi Anggaran

1) Efisiensi RO Satuan Kerja

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.02/2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran, pengukuran efisiensi RO di tingkat satuan kerja dilakukan dengan menggunakan 2 pendekatan berikut:

- a) Pengukuran di tingkat KRO, dilakukan dalam hal data realisasi anggaran RO tidak tersedia.

- b) Pengukuran di tingkat RO, dilakukan dalam hal data realisasi anggaran RO tersedia. Pengukuran efisiensi RO yang dilakukan di B2P2VRP menggunakan pendekatan pengukuran di tingkat RO, dengan rumus sebagai berikut:

$$E_{RO} = \frac{\sum_{i=1}^n ((AARoi \times CROi) - RARoi)}{\sum_{i=1}^n (AARoi)} \times 100\%$$

Keterangan:

ERo : efisiensi RO tingkat satuan kerja

AARoi : alokasi anggaran

RO i RARoi : realisasi anggaran

RO i CROi : capaian RO i

Berdasarkan rumus dan data pada tabel di atas, maka efisiensi RO terhadap capaian kinerja dan anggaran B2P2VRP Tahun B2P2VRP Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 17 Tabel Efisiensi RO terhadap capaian kinerja dan anggaran B2P2VRP pada Semester I Tahun 2023

Kode	Rincian Output (RO)	Capaian RO per RO (CRO _i)	Alokasi Anggaran (AARoi)	Realisasi Anggaran (RARoi)	(AARoi x CRO _i)	(AARoi x CRO _i) - RARoi
6834.BDD.001	Rekomendasi Kebijakan Penyakit Berbasis Vektor dan Zoonosis di Indonesia (UPT)	0	24.856.000	0	-	-
6834.BDD.014	Integrasi dan Sinergi dalam rangka pencapaian pembangunan kesehatan	0	99.697.000	0	-	-
6834.BDD.015	Akreditasi Laboratorium	0,53	154.955.000	23.222.289	82.126.150	58.903.861
6834.BDD.016	Pengadaan Reagen	0,90	500.000.000	164.631.981	450.000.000	285.368.019
6834.BDD.017	Pengadaan Peralatan Laboratorium	0,56	1.788.901.000	329.980.000	1.001.784.560	671.804.560
6834.BDD.018	Penguatan Koloni Insektarium	0,20	25.000.000	2.600.000	5.000.000	2.400.000
6834.BDD.020	Pembangunan gedung Laboratorium	0,46	1.650.316.000	199.497.120	759.145.360	559.648.240

Kode	Rincian Output (RO)	Capaian RO per RO (CRO _i)	Alokasi Anggaran (AARO _i)	Realisasi Anggaran (RARO _i)	(AARO _i x CRO _i)	(AARO _i x CRO _i) - RARO _i
6834.BDD.021	Surveilans Kesehatan Masyarakat (UPT)	0,57	1.800.000.000	333.618.800	1.026.000.000	692.381.200
6797.CAN.951	Sarana Teknologi Informasi dan Komunikasi	2,95	94.217.000	60.737.000	277.940.150	217.203.150
6797.EBA.956	Layanan BMN	0,6	12.460.000	3.360.000	7.476.000	4.116.000
6797.EBA.958	Layanan Hubungan Masyarakat	0,30	136.088.000	12.838.500	40.826.400	27.987.900
6797.EBA.962	Layanan Umum	0,77	61.200.000	53.468.549	47.124.000	- 6.344.549
6797.EBA.963	Layanan Data dan Informasi	0	56.440.000	10.650.000	-	-10.650.000
6797.EBA.994	Layanan Perkantoran	0,74	17.159.524.000	6.794.391.952	12.698.047.760	5.903.655.808
6797.EBC.954	Layanan Manajemen SDM	37	157.616.000	32.456.464	5.831.792.000	5.799.335.536
6797.EBD.952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	0,6	156.172.000	35.294.225	93.703.200	58.408.975
6797.EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	0,7	32.396.000	26.996.464	22.677.200	- 4.319.264
6797.EBD.955	Layanan Manajemen Keuangan	0,94	180.996.000	68.797.000	170.136.240	101.339.240
6797.EBD.961	Layanan Reformasi Kinerja	0	32.396.000	0	-	-
6797.EBD.974	Layanan Penyelenggaraan Kearsipan	0,6	180.996.000	10.650.100	108.597.600	97.947.500
Jumlah			24.304.226.000	8.163.190.444	22.622.376.620	14.459.186.176

Dari tabel di atas, maka perhitungan efisiensi RO anggaran B2P2VRP pada semester 1 TA 2023 adalah sebagai berikut :

$$E_{RO} = \frac{14.459.186.176}{22.622.376.620} \times 100\% = 0,64\%$$

2) Nilai Efisiensi

Untuk mendapatkan nilai Kinerja, maka seluruh indikator (penyerapan anggaran, konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan, capaian output, dan efisiensi) harus memiliki skala yang sama, yaitu dari 0%-100% (nol persen sampai seratus persen). Dari keempat variabel pengukuran tersebut variabel efisiensi tidak memiliki skala 0%-100% (nol persen sampai seratus persen). Nilai efisiensi diperoleh

dengan asumsi bahwa minimal yang dicapai Kementerian/Lembaga dalam rumus efisiensi sebesar -20% (minus dua puluh persen) dan nilai paling tinggi sebesar 20% (dua puluh persen). Oleh karena itu, perlu dilakukan transformasi skala efisiensi agar diperoleh skala nilai yang berkisar antar 0% (nol persen) sampai dengan 100% (seratus persen), dengan rumus sebagai berikut:

$$NE = 50\% + \left(\frac{E}{20} \times 50\right)$$

Keterangan:

NE : Nilai efisiensi

E : Efisiensi

Jika efisiensi diperoleh lebih dari 20% (dua puluh persen), maka NE yang digunakan dalam perhitungan nilai Kinerja adalah nilai skala maksimal 100% (seratus persen) dan jika efisiensi yang diperoleh kurang dari -20% (minus dua puluh persen), maka NE yang digunakan dalam perhitungan nilai Kinerja adalah skala minimal 0% (nol persen).

$$NE = 50\% + \left(\frac{14,92}{20} \times 50\right) = 55,95\%$$

Sesuai dengan perhitungan di atas maka dapat disimpulkan nilai efisiensi anggaran B2P2VRP pada semester I TA 2023 dari B2P2VRP adalah 209,79%.

2. Sumber Daya SDM

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, ASN terbagi menjadi dua jenis yakni PNS dan PPPK. Gambaran jumlah pegawai di B2P2VRP Salatiga dapat dilihat pada Tabel di bawah ini :

Tabel 18. Jumlah Pegawai B2P2VRP pada Semester I Tahun 2023

Satker	Jabatan					Jumlah
	Struktural	Fungsional Tertentu	Fungsional Umum	PPNPN	Outsourcing	
B2P2VRP	1	42	26	7	29	105

Pada awal semester 1 tahun 2023, terjadi perubahan jumlah pegawai di B2P2VRP Salatiga dibandingkan dengan akhir tahun 2022. Satu pegawai PPNPN mengundurkan diri setelah diterima menjadi P3K di kementerian lain. Namun, jumlah pegawai yang tersisa tidak cukup untuk menjalankan semua kegiatan operasional di B2P2VRP. Oleh karena itu, beberapa pegawai

di B2P2VRP Salatiga melakukan tugas tambahan di luar tugas utama, agar kegiatan operasional tetap dapat berjalan. Selain itu, transformasi birokrasi berdampak pada pegawai yang sebelumnya menjabat sebagai peneliti harus beralih ke jabatan fungsional kesehatan karena aturan yang melarang jabatan fungsional peneliti di luar BRIN, jabatan yang harus dipilih terdiri dari jabatan fungsional kesehatan dan jabatan fungsional non kesehatan.

3. Sumber Daya Sarana dan Prasarana

Laporan Barang Milik Negara merupakan bagian dari upaya untuk menciptakan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan sarana dan prasarana di B2P2VRP. Laporan tersebut juga menjadi pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara. Untuk mencatat dan melaporkan Barang Milik Negara, pengelolaan menggunakan aplikasi SAKTI sejak tahun anggaran 2022. Selain menggunakan SAKTI, pengelola juga masih menggunakan aplikasi SIMAN (Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara) untuk menyusun Laporan Barang Milik Negara.

Tabel 19. Ringkasan BMN B2P2VRP pada Semester I Tahun 2023

AKUN NERACA		JUMLAH
KODE	URAIAN	
1	2	3
117111	Barang Konsumsi	2,029,201,624
117113	Bahan untuk Pemeliharaan	414,000
117199	Persediaan Lainnya	103,180,600
132111	Peralatan dan Mesin	56,362,043,916
133111	Gedung dan Bangunan	19,091,979,540
134111	Jalan dan Jembatan	207,777,000
134112	Irigasi	346,807,000
134113	Jaringan	193,614,300
135121	Aset Tetap Lainnya	757,123,167
136111	Konstruksi Dalam pengerjaan	200,663,120
137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(48,092,198,579)
137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(3,172,478,731)
137311	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	(207,777,000)
137312	Akumulasi Penyusutan Irigasi	(102,821,044)
137313	Akumulasi Penyusutan Jaringan	(33,882,506)
162121	Hak Cipta	4,400,000
162141	Paten	3,000,000
162151	Software	1,411,880,167
169312	Akumulasi Amortisasi Hak Cipta	(369,467)
169314	Akumulasi Amortisasi Paten	(1,050,000)
169315	Akumulasi Amortisasi Software	(1,406,380,167)
JUMLAH		27,695,126,940

Perubahan nilai dalam saldo awal terjadi karena adanya penambahan melalui pembelian atau pengadaan, serta penyusutan nilai aset seperti peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, irigasi, dan hak cipta. Dengan adanya pencatatan dan pelaporan yang baik, diharapkan dapat tercipta pengelolaan yang efisien dan transparan dalam sarana dan prasarana di B2P2VRP Salatiga.

E. Penghargaan dan Inovasi

1. Penghargaan

Pada semester I tahun 2023 B2P2VRP meraih penghargaan sebagai berikut :

a. PPKM Award

Pemerintah memberikan penghargaan kepada individu dan instansi/organisasi yang telah memberikan dukungan dan berperan aktif dalam mengatasi pandemi COVID-19. Penghargaan ini diserahkan langsung oleh Presiden Joko Widodo di Gedung Dhanapala, Kementerian Keuangan Jakarta, pada tanggal 20 Maret. Keberhasilan dalam menghadapi pandemi COVID-19 adalah bukti bahwa Indonesia mampu mengatasi tantangan berat apa pun ketika kita bersatu untuk kepentingan bangsa dan negara. Prestasi ini bahkan diakui



oleh berbagai negara serta lembaga seperti Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dan Universitas John Hopkins. Dengan demikian, sebagai wujud penghargaan terhadap semua pihak yang turut serta dalam penanganan pandemi, pemerintah memberikan Penghargaan Penanganan COVID-19 atau PPKM Awards. Melalui penghargaan ini,

pemerintah berharap dapat memberikan inspirasi dan motivasi kepada semua pihak untuk bersatu dalam membangun dan memajukan bangsa dan negara.

Pemerintah juga berharap bahwa kerjasama, kolaborasi, dan koordinasi yang telah terbentuk akan terus berlanjut untuk mendukung penanganan masalah kesehatan lainnya. B2P2VRP menjadi salah satu instansi yang mendapatkan penghargaan ini dalam kategori Laboratorium dengan Surveilans Genetik.

b. PME

B2P2VRP mendapatkan sertifikat hasil uji profisiensi pemantapan mutu eksternal PCR Covid-19 Tahun 2023 dengan nilai Penuh sesuai dengan tanggal Sertifikat No. YM.01.03/D.XLVII/2127/2023 artinya dari seluruh sampel yang diuji semuanya merupakan hasil dengan tingkat akurasi yang optimal atau 100 persen sesuai.

Adapun Uji Profisiensi Pemantapan Mutu Eksternal PCR Covid-19 Tahun 2023 diselenggarakan oleh Badan Besar Laboratorium Kesehatan Jakarta, Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes RI), dan bekerjasama dengan World Health Organization (WHO).



2. Inovasi



Berdasarkan proses kinerja yang telah dilaksanakan oleh Insektarium nyamuk B2P2VRP mengajukan salah satu produk hasil inovasi kinerjanya pada tahun 2022 berupa alat penangkap nyamuk yang dinamakan aspirator. Alat hasil inovasi ini diharapkan dapat meningkatkan kinerja di laboratorium insektarium dan dapat dipergunakan oleh institusi atau pihak lain yang terkait. Inovasi alat ini telah mendapatkan Surat Pencatatan Hak Cipta dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Inovasi ini berkaitan dengan alat untuk menangkap serangga, yang dinamakan aspirator atau alat untuk menangkap serangga dengan cara menghisapnya. Serangga yang dimaksud adalah nyamuk, lalat dan serangga lainnya. Penggunaan aspirator dapat digunakan di lapangan maupun di laboratorium terutama untuk pengujian insektisida.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Laporan Kinerja B2P2VRP Salatiga untuk Semester 1 Tahun 2023 memberikan gambaran menyeluruh tentang kinerja organisasi. Laporan ini melibatkan evaluasi serta analisis terhadap pencapaian sasaran dan pelaksanaan kegiatan selama satu semester. Dalam rencana kinerja tahun 2023, terdapat dua sasaran strategis dengan tiga indikator kinerja. Secara keseluruhan, pencapaian sasaran strategis ini telah menunjukkan tingkat keberhasilan yang sangat positif, seperti yang terlihat dari capaian Indikator Kinerja berikut:

1. Persentase Kebijakan Kesehatan yang berhasil disusun berdasarkan rekomendasi kebijakan BKPK mencapai 75%, masih belum mendekati target yang ditetapkan sebesar 80%.
2. Nilai Kinerja Anggaran Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan berhasil mencapai 37.94 dari target 95. Meskipun belum mencapai target sepenuhnya, namun terdapat perkembangan positif dalam pencapaian nilai kinerja anggaran.
2. Persentase Realisasi Anggaran Satuan Kerja (Satker) berhasil mencapai 35,77% dari target 93%. Meskipun masih di bawah target, namun progress yang dicapai menunjukkan adanya upaya yang dilakukan dalam merealisasikan anggaran Satker

Ini mencerminkan usaha dan komitmen yang diberikan dalam mencapai sasaran strategis serta mencerminkan potensi perbaikan di masa mendatang

B. Rekomendasi

Dalam upaya untuk meningkatkan prestasi B2P2VRP Salatiga, pada paruh kedua tahun 2023, kami memiliki rencana perbaikan dengan langkah-langkah berikut:

1. Pentingnya memiliki struktur organisasi yang terdefinisi dengan baik dan tata kerja yang jelas untuk mengatur tugas dan fungsi dari setiap unit kerja. Ini akan memberikan dasar hukum dan tujuan yang sesuai dengan peran masing-masing unit kerja.
2. Diperlukan perencanaan anggaran yang lebih matang guna menghindari perubahan anggaran yang sering terjadi dalam tahun berjalan. Hal ini akan membantu menjaga stabilitas dalam pelaksanaan program dan proyek.
3. Koordinasi yang efektif antara pegawai dan lembaga sangat penting agar pelaksanaan kegiatan berjalan lancar dan efisien. Ini dapat membantu mengurangi risiko ketidakberesan dan ketidaksempurnaan dalam kerja sama.
4. Inovasi perlu diterapkan untuk meningkatkan efisiensi dalam kinerja. Dengan mencari cara baru untuk melakukan tugas-tugas rutin atau memperkenalkan teknologi baru, proses kerja dapat menjadi lebih efisien.
5. Peningkatan kompetensi dan kualitas sumber daya manusia harus diutamakan, karena mereka merupakan aset utama dalam menghadapi tantangan masa depan. Melalui pelatihan dan pengembangan, SDM akan lebih siap untuk menghadapi perubahan dan tuntutan yang muncul.

LAMPIRAN


KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

BALAI BESAR PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN VEKTOR DAN RESERVOIR PENYAKIT

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : dr. Bagus Febrianto, M.Sc
 Jabatan : Pjt. Kepala Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Vektor dan Reservoir Penyakit

selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Dr. Wirabrata, Apt
 Jabatan : Kepala Pusat Kebijakan Sistem Ketahanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 30 Januari 2023

Pihak Kedua, Pihak Pertama

Dr. Wirabrata, Apt **dr. Bagus Febrianto, M.Sc**

Mengetahui Kepala,



Syarifah Liza Munira

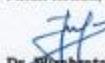
**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BALAI BESAR PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN VEKTOR DAN RESERVOIR PENYAKIT**

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya kebijakan sistem ketahanan kesehatan dan sumber daya kesehatan berbasis bukti	1. Persentase kebijakan Kesehatan yang disusun berdasarkan rekomendasi kebijakan BKPK	80
2.	Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya	1. Nilai kinerja penganggaran Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan 2. Persentase Realisasi Anggaran Satker	93 95

Kegiatan	Anggaran
1. Perumusan Kebijakan Sistem Ketahanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan	Rp 5.001.184.000,-
2. Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan	Rp 19.805.113.000,-
Total Anggaran DIPA Balai Besar Litbang Vektor dan Reservoir Penyakit	Rp 24.806.297.000,-

Jakarta, 30 Januari 2023

Pihak Kedua, Pihak Pertama

Dr. Wirabrata, Apt **dr. Bagus Febrianto, M.Sc**

Mengetahui Kepala,



Syarifah Liza Munira